

BAB IV
DIPLOMASI INDONESIA DALAM MENJAGA KEPULAUAN NATUNA DARI
KLAIM REPUBLIK RAKYAT CHINA

Di dalam ruang lingkup Internasional banyak hubungan negara-negara yang bisa dikatakan bersifat anarki dalam memandang suatu kedaulatan yaitu sebagai sesuatu yang jelas yang mengarah kepada timbulnya suatu konflik yang disebabkan oleh eksistensi sebuah negara yang menganggap ancaman dari negara lain. Sehingga untuk menimbulkan rasa keamanan negara dari anacam-anacam dari negara lain, negara juga perlu membangunkan kekuatan militer yang baik, seperti membangun kekuatan militer negara yang berdasarkan kekuatan Nasional dan hubungan aliansi dengan negara lain sebagai bentuk dari pencapaian kekuatan militer yang kuat atau mengimplementasikan strategi militer negara agar mencapai keamanan terutama pada wilayah perbatasan perairan atau maritim.

Dalam melakukan pencapaian keamanan maritim dalam aspek pertahanan yaitu melakukan peranan kekuatan laut (Sea Power) yang kuat. Karena dalam hal ini harus berjalan dengan baik dengan kondisi geografis wilayah dunia. Apabila dilihat kondisi dari geografis wilayah Dunia menggambarkan bahwasannya negara-negara yang ada di dunia sangat ketergantungan terhadap laut. karena kurang dari 70% wilayah dari dunia yaitu didominasi oleh lautan dan kebanyakan dari negara-negara didunia melakukan perdagangan banyak menggunakan jalur perairan, dan juga adapun kebebasan dalam memberdayakan kekayaan alam yang ada di laut yang di berikan oleh Hukum Internasional. Dengan beberapa penyebab tersebut yang dapat mempengaruhi perekonomian dan kepentingan Nasional yang mesti dilindungi dari ancaman luar.

Laut China Selatan memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar dan menjadikan hal ini sebagai faktor pemicu terjadinya konflik di wilayah perairan Laut China Selatan. Negara-negara yang secara geografis berada sangat dekat dengan Laut China Selatan menjadi terlibat atau turut serta dalam mempengaruhi terjadinya konflik di Laut China Selatan dan juga jalur yang ada di Laut China Selatan memiliki peran penting dalam mempengaruhi perkembangan ekonomi, Politik serta sosial bagi negara-negara yang berada di daerah perairan Laut China Selatan.

Dengan posisi Laut China Selatan yang strategis dengan jalur perdagangan Internasional yang mampu melibatkan negara-negara yang berada disekitar perairan Laut China Selatan dalam suatu konflik dengan negara Republik Rakyat China, dimana China mengklaim beberapa wilayah-wilayah perairan Laut China Selatan dengan dianggap mengganggu kedaulatan negara-negara ASEAN di Laut China Selatan. Konflik Laut China Selatan yang melibatkan negara-negara ASEAN dengan Republik Rakyat China bisa saja memicu konflik perang senjata atas klaim China di Laut China Selatan.

Agar konflik di kawasan Laut China Selatan lebih kondusif atau bisa diredakan agar tidak terjadinya konflik perang antara Republik Rakyat China dengan negara-negara ASEAN yaitu, negara-negara ASEAN dengan Republik Rakyat China melakukan pertemuan guna membahas konflik Laut China Selatan yaitu berupa Negosiasi yang baik.

A. Republik Rakyat China klaim Natuna sebagai Teritorial

Pada saat Republik Rakyat China merilis peta baru di Laut China Selatan seakan membuat heboh negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Dengan peta baru tersebut, China mengklaim sebagian wilayah Kepulauan Natuna masuk kedalam wilayah teritorial China. Atas klaim yang telah di lakukan oleh China, Presiden

Jokowi dalam pidatonya di Jepang meminta agar Republik Rakyat China tidak macam-macam dan mengganggu atau berhati-hati dalam menentukan perbatasan lautnya karena klaim tersebut telah mengusik kedaulatan NKRI. China mengklaim Natuna di peta China dengan *Nine Dash Line* baru yang masuk kedalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Klaim yang menyangkut Kepulauan Natuna tersebut juga berawal dari klaim sepihak tersebut terkait dengan sengketa Kepulauan Spratly dan Paracel antara negara Republik Rakyat China dengan Filipina (News B. , 2015).

Setelah mengetahui bahwa Kepulauan Natuna perairannya masuk kedalam *Nine Dash Line* China, pemerintah Indonesia langsung terjun menuju ke Natuna guna melakukan peninjauan secara nyata strategi dari komponen utama pertahanan NKRI yaitu TNI terutama dalam kemampuan dan gelar pasukan apabila terjadi sesuatu di wilayah Natuna (AntaraNews, 2014).

Nine Dash Line China masuk ke dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Republik Indonesia pertama kali mengetahui persoalan *Nine Dash Line* pada *Workshop Managing Potential Conflicts in the South China Sea* pada tahun 1993. Dimana pada saat itu delegasi yang berasal dari Republik Rakyat China mendistribusikan satu peta yang telah dicantumkan didalamnya *Nine Dash Line* dan menjorok ke perairan milik Natuna. Pada saat mengetahui hal tersebut, Indonesia beraksi akan peta itu muncul dan meminta kejelasan atas *Nine Dash Line* tersebut dan China tidak memiliki kejelasan apaun pada saat itu. Yang jelas dampak dari *Nine Dash Line* bukan persoalan kepemilikan Natuna melainkan batas maritim Republik Indonesia (CNNIndonesia, 'Nine-Dashed Line China ke Natuna Bak Muncul dari Langit', 2016).

Pada 19 Maret 2016 lalu, *Nine Dash Line* kembali menjadi persoalan serius bagi Republik Indonesia. Karena insiden antara Kapal Pengawas Hiu 11 milik

Kementerian dan Perikanan Republik Indonesia dengan Kapal Kway Fey berbendera China yang telah melakukan *Illegal Fishing* di perairan Natuna. Atas insiden pertama tersebut, Indonesia langsung melayangkan nota protes terhadap China dan menuduh telah melanggar Kedaulatan dan Yuridiksi Republik Indonesia serta melanggar upaya penegakan hukum oleh aparat Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif Republik Indonesia. China menanggapi Insiden di perairan Natuna dengan penjelasan bahwa perairan tersebut masuk ke dalam *Nine Dash Line* dan diperbolehkan nelayan-nelayan China menangkap ikan di daerah tersebut (CNNIndonesia, 'Nine-Dashed Line China ke Natuna Bak Muncul dari Langit' , 2016).

Setelah insiden tersebut terjadi, Indonesia melakukan razia terhadap kapal-kapal asing yang menangkap ikan di Natuna, tetapi pemerintah China protes akan hal tersebut. Karena di kawasan perairan Natuna tersebut adalah tempat atau daerah penangkapan ikan Tradisional milik leluhur China terdahulu dan alasan tersebut tidak ada sama sekali di dalam UNCLOS (CNNIndonesia, 'Nine-Dashed Line China ke Natuna Bak Muncul dari Langit' , 2016).

Republik Rakyat China juga menyerukan negosiasi secara langsung terhadap konflik sengketa kawasan Laut China selatan, sebab masalah tersebut kian dicampuri oleh pihak lain yang tidak berkepentingan dan juga negara-negara ASEAN seharusnya mengenyampingkan perbedaan demi terciptanya situasi yang aman dan kondusif di Laut China Selatan.

Republik Rakyat China melalui Perdana Menteri Li Keqiang menganggap bahwasannya dalam beberapa tahun sengketa Laut China Selatan yang semestinya diselesaikan secara langsung oleh negara-negara yang bersangkutan yaitu melalui negosiasi dan perundingan dan telah menjadi masalah yang sepertinya mengganggu

stabilitas dan perdamaian di Laut China Selatan dan kebebasan dalam navigasi. Republik Rakyat China juga mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan yang diyakini kaya sumber daya minyak dan gas sehingga China mendapatkan protes dari negara pengklaim lainnya karena China telah melakukan reklamasi pantai dan pangkalan militer di Kepulauan Spratly (JakartaGreater, 2015).

Selain ASEAN seperti Pemerintahan Amerika Serikat juga dengan alasan mendukung kebebasan navigasi laut terkait ancaman terhadap Republik Rakyat China. Ketegangan sempat terjadi karena Amerika Serikat juga menusunkan kapal perang mereka pada wilayah yang diklaim oleh China. Pada saat KTT ASEAN yang dilakukan di Kuala Lumpur, Presiden Amerika Serikat pada saat itu Barack Obama menyerukan kepada Republik Rakyat China agar mereka menghentikan pembangunan pulau buatan dan memiliterisasi wilayah tersebut.

Perdana menteri Republik Rakyat China yaitu Li Keqiang menyanggah dari pernyataan yang telah dilontarkan oleh Pemerintah Amerika Serikat kepada Republik Rakyat China yaitu Republik Rakyat China menyatakan bahwasannya negara-negara yang berada di luar kawasan melakukan campur tangan atas sengketa Laut China Selatan dan Republik Rakyat China menyampaikan ketidak adaan kepentingan siapapun yang hanya saja dengan memperluas kepentingan bersama dan mencari landasan bersama agar ASEAN dengan Republik Rakyat China mampu mempersempit perbedaan.

Pada bulan Oktober tahun 2014 di Bangkok, Republik Rakyat China melakukan pertemuan negosiasi dengan negara-negara ASEAN dalam membahas konflik Laut China Selatan yang masih terus berjalan. Dalam pertemuan negosiasi tersebut pada bulan Oktober telah dibuat berupa daftar kesamaan untuk dijadikan bahan untuk negosiasi di masa yang akan datang. Di dalam pertemuan tersebut ada beberapa hal

yang disampaikan yaitu, Republik Rakyat China kembali menyampaikan beberapa hal tentang komitmen-komitmen yang sebelumnya telah diberi tahu seperti China ingin adanya kesimpulan dari cara kode etik negara-negara ASEAN di kawasan Laut China Selatan. Pada pertemuan yang sama pula Republik Rakyat China dengan negara-negara ASEAN sepakat akan lebih sering mengadakan pertemuan tersebut dan membahas konflik kawasan Laut China Selatan dan Republik Rakyat China dalam pertemuan negosiasi dengan negara-negara ASEAN harus mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai dalam pembahasan kode etik (SariDewi, 2014).

Proses tersebut sepertinya akan masih terus bergulir dan harapan dari negara-negara ASEAN khususnya Indonesia berharap daftar kesamaan yang telah disepakati tersebut akan dikembangkan kembali oleh Indonesia dan menjadi bagian dari dokumen kode etik. Indonesia juga berharap atas kemajuan yang dilakukan tersebut juga akan di bicarakan di tingkat para pemimpin negara-negara ASEAN dan China di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-25 ASEAN yang digelar pada 12 sampai 13 November 2014 (SariDewi, 2014).

B. Negosiasi Republik Indonesia dengan Republik Rakyat China

Pada Konferensi Tingkat Tinggi ke-25 tahun hubungan ASEAN dengan Republik Rakyat China, Presiden Republik Indonesia yang ke-7 yaitu Bapak Joko Widodo menekankan bahwa pada momentum tersebut untuk menyelesaikan negosiasi Kode Etik Perilaku di Laut China Selatan. Pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi pada KTT ASEAN-CHINA di NATIONAL CONVENTION CENTER (NCC) di Vientiane, Laos. Pernyataan tersebut bahwa ASEAN dan Republik Rakyat China harus mampu memberikan kontribusi terhadap perdamaian dan stabilitas di kawasan sehingga mampu mencapainya keamanan di Laut China Selatan harus

dipelihara dan dari pihak Republik Rakyat China menanggapi pernyataan Presiden Jokowi dengan Positif (Netralitas, 2016).

COC atau disebut dengan Kode Etik tersebut aka menjadi pengantar penguat dalam menjaga stabilitas keamanan dan perdamaian di Laut China Selatan yang mampu sejalan dengan hukum Internasional yang berlaku dan juga UNCLOS 1982. Selanjutnya dalam Konfrensi Tingkat Tinggi tersebut Presiden Jokowi juga melakukan penekanan terhadap pentingnya dalam penyelesaian sengketa wilayah Laut China Selatan secara damai dan Kondusif serta penerapan Deklarasi tentang Tata Perilaku pihak-pihak di laut China Selatan secara penuh dan efektif untuk penyelesaian negosiasi Kode Etik di Laut China Selatan (Netralitas, 2016).

Atas pertumbuhan ekonomi ASEAN dengan Republik Rakyat China perlu melakukan penyelesaian dan penerapan Kode Etik di Laut China Selatan sebagai pendorong untuk menjaga stabilitas kawasan. Terlebih Potensi yang dimiliki oleh ASEAN dengan Republik Rakyat China antara lain perdagangan yang mencapai 364,4 Miliar dollar AS yang telah menjadikan Republik Rakyat China sebagai mitra terbesar dalam perdagangan ASEAN dan sebagai Penanam Modal Langsung (FDR) dengan nilai investasi mencapai 8,2 miliar dollar AS.

Pada saat Konfrensi Tingkat Tinggi yang ke-25 tahun ASEAN dengan Republik Rakyat China yang digelar di NCC Laos, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan beberapa-beberapa pemimpin ASEAN lainnya serta perdana Menteri China Li Keqiang telah mencapai hasil dari KTT tersebut yaitu ASEAN dan Republik Rakyat China telah menyepakati dua Dokumen hasil, yaitu pernyataan bersama tentang Aplikasi *Code for Unplanned Encounters at Sea* (CUES) di Laut China Selatan serta panduan penerapan *Hotline Communication* (Komunikasi langsung) di antara pejabat

tinggi Kementerian Luar Negeri ASEAN dan Republik Rakyat China untuk penerapan Kode Etik (Netralitas, 2016).

Kemudian pertemuan selanjutnya pada 25 Juli 2016 yang di adakan di Vientiane Ibu kota dari Republik Demokratik Rakyat Laos. Pertemuan tersebut tidak di hadiri oleh pemimpin-pemimpin negara anggota ASEAN, melainkan pertemuan tersebut di hadiri oleh menteri-menteri luar Negeri negara anggota ASEAN. Pertemuan tingkat menteri luar negeri tersebut sudah satu suara dengan persoalan masalah di Laut China Selatan dan negara anggota ASEAN pun akhirnya sepakat bersama dengan negara Republik Rakyat China untuk menjaga perdamaian di Laut China Selatan (Deticnews, 2016).

Tabel 4.1 Tabel Negosiasi Diplomat 25 Juli 2016 di Vientiane LAOS

NO	Isi Negosiasi	Nama Diplomat
1	Membicarakan tentang kesepakatan untuk menjaga kestabilan di Laut China Selatan	Retno Marsudi / Indonesia
2	Permasalahan Konflik Laut China Selatan	Don Pramudwinai / Thailand
3	Membicarakan tentang kesepakatan saling mempercayai di Laut China Selatan	Pham Binh Minh / Vietnam
4	Kestabilan di Laut China Selatan serta pembahasan tentang kode etik di Laut China Selatan	Mr. DR. Mohamad Maliki Osman / Singapura
5	Pembicaraan tentang Keamanan dan kebebasan di dalam Navigasi	Sri Anifah Aman / Malaysia
6	Menjaga kestabilan di Laut China Selatan dan mencari kesepakatan	Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah / Brunei Darusalam
7	Penyelesaian kode etik Asia Tenggara di Laut China Selatan	Perfecto Yasay Jr / Filipina
8	Membicarakan tentang kedamaian di Laut China Selatan	Suu Kyi / Myanmar
9	Membicarakan tentang Konflik Laut China Selatan	Saleumxay Kommasith / Laos
10	Membahas kesepakatan bersama tentang konflik Laut China Selatan & Meminta agar memperluas kepentingan bersama dan mencari landasan bersama agar ASEAN dan China mampu mempersempit Perbedaan	Wang Yi / Republik Rakyat China

Dengan pertemuan yang di hadiri menteri-menteri luar negeri negara anggota ASEAN dan Republik Rakyat China pun akhirnya menemukan kesepakatan untuk saling mempercayai dan menjaga stabilitas di Laut China Selatan, seperti yang tertulis di dalam piagam PBB dan Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) Tahun 1982. Adapun beberapa poin penting yang telah di sepakati di dalam pertemuan tersebut:

1) Mereka menegaskan dengan rasa hormat mereka dan komitmen untuk kebebasan yang dimiliki di dalam navigasi di kawasan Laut China Selatan sebagaimana yang terdapat di dalam prinsip-prinsip yang telah di akui secara Universal oleh Hukum Internasional termasuk juga UNCLOS 1982.

2) Pihak-pihak yang bersangkutan akan berusaha dalam menyelesaikan permasalahan teritorial mereka dan yuridiksi sengketa dengan cara damai dan tanpa harus menggunakan ancaman ke negara lain atau menggunakan kekuatan militer dan melalui konsultasi damai dan bernegosiasi yang berdaulat dengan cara menyatakan secara langsung kepada pihak yang bersangkutan. Sesuai dengan yang di akui secara Universal oleh prinsip-prinsip Hukum Internasional termasuk juga Unclos 1982.

3) Pada kawasan Laut China Selatan, pihak-pihak yang bersangkutan harus berusaha agar menahan diri dan tidak melakukan kegiatan yang akan mempersulit serta meningkatkan perselisihan yang akan mempengaruhi perdamaian dan stabilitas Laut China Selatan. Seperti contoh melakukan pengambilan terumbu karang atau seperti menghuni pulau yang tak berpenghuni.

4) Pihak-pihak yang terkait dapat menjelajahi atau melakukan suatu kegiatan bersama di bidang-bidang tertentu seperti melakukan keselamatan navigasi, pencarian dan penyelamatan, perlindungan lingkungan, riset ilmiah kelautan serta memerangi kejahatan jalur Transnasional di laut.

5) Pihak-pihak yang terkait mendorong negara lain untuk menghormati prinsip-prinsip yang terkandung dalam Kode Etik.

6) Dari pihak-pihak yang bersangkutan menegaskan bahwa menjalankan kode etik di Laut Cina Selatan akan lebih mempromosikan perdamaian dan stabilitas di wilayah dan setuju untuk bekerja, atas dasar konsensus, menuju akhirnya pencapaian tujuan perdamaian di Laut China Selatan.

Dari pembeahasan yang telah di lakukan oleh para Menteri Luar Negeri negara-negara anggota ASEAN dengan Republik Rakyat China telah menemukan kesepakatan agar perdamaian yang di inginkan di Laut China Selatan tercapai

sehingga tidak ada lagi persoalan-persoalan yang membuat ancaman bagi negara-negara yang bersangkutan di Laut China Selatan.

Kemudian selanjutnya pembahasan tentang Kode Etik yang akan di lakukan pada tahun 2017 akan di lakukan di Beijing dengan negara-negara ASEAN terkait soal kerangka kerja Kode Etik di Laut China Selatan pada Mei mendatang dan pertemuan yang dilakukan di negara Republik Rakyat China tersebut dilakukan atas bentuk upaya dalam jangka panjang guna meredakan ketegangan yang terjadi akibat sengketa Laut China Selatan dan menjamin keamanan di kawasan serta melakukan kemajuan yang signifikan pada kerangka kerja Kode Etik bagi ASEAN dan Republik Rakyat China (CNNIndonesia, 2017).

Namun negosiasi yang dilakukan di negara Republik Rakyat China berjalan lambat di karenakan suara konsesus ASEAN sulit dipahami oleh China dan Beijing juga menolak keras sejumlah aturan yang menghalangi patroli lautnya di perairan Laut China Selatan. Sebagai ketua ASEAN tahun 2017 yaitu negara Filipina berharap pembicaraan negosiasi tentang Kode Etik di Laut China Selatan akan dapat terselesaikan dibawah kepemimpinan Filipina selaku ketua ASEAN 2017.

Filipina juga menyatakan bahwa ASEAN akan berupaya penyelesaian kerangka Kode Etik tersebut secara cepat dan sesuai dengan target bahwa pertengahan tahun 2017 selesai dan pada saat deklarasi tersebut ASEAN dengan Republik Rakyat China sepakat agar mampu mengendalikan diri agar dapat menghindari dari tindakan-tindakan yang bisa mempersulit konflik sengketa dan termasuk menghindari dari tindakan militer (Perang) dalam penyelesaian konflik (CNNIndonesia, 2017).

Filipina selaku ketua ASEAN pada tahun 2017 juga menyatakan melalui Wakil Menteri Luar Negeri Filipina dibidang kebijakan yaitu Enrique Manalo bahwa

ASEAN akan mempercepat penyelesaian tentang kerangka kerja Kode Etik di dalam sengketa Laut China Selatan sehingga permasalahan negara-negara anggota ASEAN dengan Republik Rakyat China di Laut China Selatan selesai pada pertengahan tahun 2017 dan Filipina Sebagai ketua ASEAN memang berharap besar agar pembicaraan masalah Kode Etik di Laut China Selatan selesai di bawah kepemimpinannya di tengah persoalan ketegangan antara Amerika Serikat dengan Republik Rakyat China terkait konflik Laut China Selatan yang kian menguat (Suastha, 2017).

Filipina juga menegaskan bahwa pada pertemuan pembahasan tentang konflik yang terjadi di Laut China Selatan tidak dibahas secara spesifik dan ASEAN hanya akan mencoba untuk memastikan kawasan Laut China Selatan akan tetap stabil di tengah potensi konflik maritim yang cenderung tinggi. Alasannya adalah ASEAN sedang mencoba untuk menyelesaikan Kode Etik karena Kode Etik adalah yang utama bagi negara-negara anggota ASEAN dalam penyelesaian Laut China Selatan dan Republik Rakyat China setuju akan hal tersebut.

Seperti yang telah dikatakan sebelumnya negosiasi berjalan lambat dikarenakan suara konsensus ASEAN yang telah dianggap oleh Republik Rakyat China sulit untuk dipahami. Dikarenakan dianggap telah menghalangi patroli lautnya di perairan Laut China Selatan. Dari pada itu konflik maritim di kawasan Laut China Selatan tak kunjung usai meskipun Pengadilan Arbitrase Permanen telah menetapkan bahwa klaim Republik Rakyat China atas perairan Laut China Selatan tidak sah. Namun, disisi lain Amerika Serikat juga semakin bersikap tegas terhadap keberadaan China di Laut China Selatan meski Amerika Serikat bukan termasuk ke dalam negara pengklaim dalam sengketa tersebut, karena Amerika Serikat juga memiliki

kepentingan untuk mempertahankan perairan itu menjadi perairan Internasional (Suastha, 2017).

Setelah beberapa waktu berselang usai komitmen ASEAN-CHINA, Indonesia kembali menegaskan posisinya soal isu sengketa kawasan kemaritiman di Laut China Selatan. Melalui pernyataan wakil menteri luar negeri Indonesia AM Fachir pada penyampaian pidato pembuka untuk di Jakarta 16 November 2017 dalam The 27th Workshop on Managing Potential Conflicts in the South China Sea. Pada penyampaian tersebut bahwa Indonesia percaya bahwa isu Laut China Selatan harus dikelola dengan cara damai dengan pihak yang terlibat di Laut China Selatan guna menurunkan tensi antar negara. Forum tersebut di hadiri oleh delegasi, perwakilan maupun komunitas akademik dari negara-negara yang terlibat dalam isu sengketa Laut China Selatan seperti Filipina, Malaysia, Brunei Darusalam, China dan negara anggota ASEAN lainnya (Hasan, 2017).

Pembahasan tersebut dilaksanakan setelah beberapa hari kesepakatan ASEAN-CHINA untuk memulai dialog tentang Code of Conduct on South China Sea (CoC-SCS) pada KTT ASEAN 2017 di Manila 13-14 November 2017 dan dalam sesi pleno leaders ASEAN-CHINA para pemimpin negara anggota mengumumkan permulaan negosiasi Kode Etik Laut China Selatan. Pada forum-forum yang dilakukan, Indonesia secara aktif mengelola isu Laut China Selatan di berbagai kesempatan seperti di dalam forum yang pernah dilakukan. Pada forum tersebut Indonesia menegaskan bahwa forum ini dilakukan dapat menjadi tempat untuk saling pengertian antara sesama negara demi mengelola potensi konflik yang mungkin terjadi (Hasan, 2017).

Melalui mekanisme ASEAN, Indonesia telah menyusun rancangan awal tentang naskah Code of Conduct on South China Sea ke berbagai negara yang terlibat atas

isu sengketa Laut China Selatan. Pada saat itu, Indonesia telah menampilkan zero draft terlebih dahulu yang berisi tentang beberapa hal yang mungkin bisa disepakati dan mungkin sedikit susah mengingat masih ada beberapa kendala dikarenakan masing-masing dari negara yang terlibat di Laut China Selatan memiliki kepentingan nasional yang berbeda-beda (Hasan, 2017).

Pada saat dialog mengenai CoC-SCS antara ASEAN dengan China picu situasi Kondusif. Karena ASEAN sebagai organisasi multilateral yang menjalin kemitraan dengan negara lintas kawasan dan memiliki tempat yang efektif guna pembahasan atas isu sengketa Laut China Selatan. Pemicu situasi kondusif dikarenakan ASEAN yang telah menghasilkan ketergantungan ekonomi di kawasan, kemudian China tergantung dengan negara tetangganya termasuk juga Indonesia. Dengan saling ketergantungan akan hal tersebut, pada akhirnya membuat berbagai pihak yang bersengketa menghindari saling serang atas isu Laut China Selatan (Hasan, 2017).

C. Sinyal Peringatan Indonesia Kepada China

Disaat sengketa permasalahan tersebut masih berada dalam penegosiasian antara negara-negara anggota ASEAN dengan Republik Rakyat China, Indonesia juga telah melakukan beberapa bentuk Diplomasi dalam permasalahan Kepulauan Natuna yang telah diklaim oleh Republik Rakyat China, diplomasi tersebut yang dilakukan oleh Indonesia yaitu berupa pemberian Signal atau tanda di Kepulauan Natuna.

Pemerintah Indonesia melalui TNI angkatan Laut telah melakukan penembakan terhadap kapal-kapal berbendera China yang telah melakukan *Illegal Fishing*. Di dalam penerapan hal tersebut, TNI angkatan Laut pernah terlibat pada insiden penangkapan kepada kapal China di perairan Natuna.

KRI Oswald Siahaan-354 menangkap kapal ikan milik China Gui Bei Yu bernomor 27088 yang memasuki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Laut Natuna. Di

dalam kejadian tersebut, terjadi kejar-kejaran antara Kapal Indonesia dengan kapal China dan penembakan-penembakan peringatan juga telah di lontarkan oleh kapal Indonesia terhadap kapal China di Natuna. Terjadinya insiden tersebut berawal ketika kapal TNI AU melakukan patroli di perairan milik Natuna pada posisi 05° 16' 00" Lintang Utara dan 110° 14' 00" Bujur Timur. Pada saat Patroli tersebut, terdeteksi oleh TNI AU bahwa kapal milik China melakukan *Illegal Fishing* di perairan Natuna (Sucipto, 2016).

KRI Oswald Siahaan-354 melumpuhkan kapal China tersebut yang awalnya tidak menghentikan pelarian mereka dan pada akhirnya TNI AU melumpuhkan kapal China dengan cara menembakan pada haluan dan buritan kapal nelayan China. Pada saat insiden kejar-kejaran antara kapal TNI AU dengan nelayan China, ada kapal coasy guard milik China pada saat penangkapan kapal nelayan dilakukan. Namun, tidak berani mendekat dan mengganggu proses penangkapan yang dilakukan oleh KRI Oswald Siahaan. Pada saat tembakan peringatan tidak di hiraukan oleh kapal nelayan milik China. Setelah kapal ikan China dapat dihentikan, Tim Visit Board Search and Seizure (VBSS) KRI Oswald Siahaan-354 diluncurkan untuk melakukan pemeriksaan di atas kapal yang diawaki delapan orang Anak Buah Kapal (ABK) yang semuanya berwarga negara China (Sucipto, 2016).

Tim VBSS melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen kapal dan muatan ikan hasil tangkapan. Berdasarkan hasil proses pemeriksaan sementara, kapal ikan tersebut diduga melakukan penangkapan ikan di wilayah yurisdiksi Indonesia tanpa dilengkapi dokumen yang sah menurut hukum. Hasil temuan tersebut, kapal dan semua ABK serta muatan ditarik menuju Pangkalan Angkatan Laut Natuna guna proses pemeriksaan hukum yang berlaku. Dasarnya, kapal tersebut memasuki wilayah ZEE Indonesia (Sucipto, 2016).

Penangkapan tersebut untuk memberikan peringatan kepada dunia bahkan China bahwa TNI AU secara tegas menindak kapal-kapal yang melakukan pelanggaran di wilayah yurisdiksi Indonesia. Selain melakukan penembakan kapal nelayan China di perairan Indonesia, Pemerintah Indonesia juga seakan menampakkan sikap atas permasalahan konflik Natuna dengan China.

Seperti yang telah dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Joko Widodo serta Panglima tertinggi TNI di KRI Imam Bonjol 383 di Perairan Natuna pada 23 Juni 2016. Langkah yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi tersebut merupakan langkah Bidak Kuda yang dingin namun sarat efek strategis. Di atas kapal Imam Bonjol 383 tersebut Presiden beserta panglima tertinggi TNI menggelar rapat di atas kapal perang tersebut guna menunjukkan komitmen Republik Indonesia untuk hadir dan menjaga wilayah Hak berdaulat Republik Indonesia menyusul protes dari Republik Rakyat China atas penembakan kapal nelayannya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Meski langkah yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi adalah bentuk sikap yang asertif yaitu sikap yang menunjukkan komunikatif dalam bentuk tindakan tetapi tidak menyinggung prasaan lain, didalam pemberantasan illegal fishing. Dampak dari limpahan strategis tersebut yang melekat justru melampaui permasalahan pencurian ikan. Manuver yang dilakukan di atas kapal perang tersebut menjadi sebuah pesan tersendiri bagi Republik Rakyat China yang memiliki hasrat besar dalam melanjutkan klaim teritorial di Kepulauan Natuna sebagai bagian dari klaim besar di Laut China Selatan (Trihartono, 2016).

Klaim yang telah dilakukan Oleh Republik Rakyat China atas perairan di sekitar Kepulauan Natuna yang beririsan dengan garis Nine Dash Line tidak lah berdiri sendiri melainkan klaim ini dikarenakan klaim tersebut tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan teritorial yang lepas dari konteks globalnya.

Konsep dari Nine Dash Line yang telah penulis bahas pada bab-bab sebelumnya mencuat pada tahun 1993 sebagai klaim sepihak Republik Rakyat China mengenai batas-batas daerah teritorialnya di Laut China Selatan yang bersandar pada rasionalisasi sejarah. Namun pada konteks Natuna, klaim yang telah dilakukan oleh Republik Rakyat China tersebut yang masih sumir (persidangan pelanggaran lalu lintas) itu tampak berbeda dengan klaim teritorial dan Hak berdaulat Republik Indonesia pada Zona Ekonomi Eksklusif yang bersandar pada konvensi PBB tentang hukum Laut (UNCLOS 1982).

Setelah Nine Dash Line timbul menjadikan klaim cangkupan wilayah Republik Rakyat China menjadi sangat luas membentang dari Asia timur ke Asia tenggara dan kemudian Beijing juga menguasai sebanyak 90% perairan dalam serta kurang lebih 3,5 juta kilometer persegi adalah sebagai bentuk kepentingan yang sedang diperjuangkan oleh Republik Rakyat China (Trihartono, 2016). Sikap Beijing juga “keras” dalam menguasai jalur *lifeline security* dan pusat transportasi laut ASIA serta klaim atas Spatly dan paracer menyebabkan ke empat negara anggota ASEAN menjadi pihak yang seketika bersengketa dengan Republik Rakyat China, karenanya Laut China Selatan sebagai zona inti yang justru melekat di dalamnya potensi konflik yang hebat.

Dengan sikap dari Republik Rakyat China yang terbilang agresif, dengan itu Republik Indonesia gencar dalam mempertahankan klaim Republik Rakyat China atas Kepulauan Natuna seperti halnya yang telah dilakukan adalah Langkah Bidak Kuda. Dengan melakukan Diplomasi Megafon di Perairan Natuna, sebuah manuver yang sederhana tetapi memiliki penuh makna. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi langkah Bidak Kuda seakan memberi aksentuasi, paling tidak tuga aspek strategis (Trihartono, 2016):

1) Jakarta memberi pesan tegas penolakan klaim Beijing terhadap hak kedaulatan Republik Indonesia di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif di sekitar Kepulauan Natuna dan sikap Jakarta sejatinya ditujukan kepada pelaku Illegal Fishing sekaligus kepada China untuk menghormati Hak Kedaulatan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Republik Indonesia. Jakarta juga menganggap pencurian ikan yang telah dilakukan nelayan China tersebut telah dimaknai sebagai pintu masuk bagi cengkeraman klaim Teritorial yang lebih besar dan itu sikap Jakarta menganggap sebagai masalah kriminal dan juga menyangkut kedaulatan Wilayah.

2) Signal yang telah ditujukan oleh Republik Indonesia Untuk Republik Rakyat China yaitu Indonesia bisa menjadi tanda keras atas kepemilikan Natuna kepada China. Indonesia memiliki pesan yang cukup jelas, apabila Beijing bermain dengan permasalahan teritorial diatas klaim yang masih sumir, tidak menutup kemungkinan Jakarta akan berubah sikap dari sikap Netral ke sikap berhadapan dalam membendung klaim Republik Rakyat China atas garis Nine Dash Line di Natuna dan tidak menutup kemungkinan Republik Rakyat China akan kehilangan Indonesia sebagai mitra strategisnya di Asia Tenggara.

3) Langkah yang telah dilakukan oleh Presiden Indonesia Jokowi telah menjadikan momentum untuk memperkuat kembali sentralitas ASEAN dalam penyelesaian akan klaim Teritorial yang dilakukan oleh Republik Rakyat China. Pada masalah mengenai Laut China Selatan membuat negara anggota ASEAN dengan Republik Rakyat China belum berhasil membangunkan rasa saling percaya di antara mereka.

Setelah Republik Rakyat China melihat ASEAN yang sebagai kekuatan Multilateral yang mampu melemahkan klaim teritorial yang telah dilakukannya, Republik Rakyat China meninggalkan sentralitas ASEAN dan memilih jalan untuk

menyelesaikannya secara Bilateral dengan negara-negara yang bersengketa tersebut. Jakarta juga berpeluang untuk kembali mengambil inisiatif untuk penyelesaian secara damai mengenai sengketa tersebut dikarenakan Indonesia, Republik Rakyat China dan negara-negara anggota ASEAN perlu harus kembali kepada yang sama yaitu bagi penataan kawasan Asia yang stabil dan damai (Trihartono, 2016).

Jakarta sebagai *Primus inter pares* (pemimpin melalui musyawarah sesama anggota) di ASEAN membuat Jakarta memiliki tanggung jawab secara moral untuk menyatukan perbedaan pandangan dan mengembalikan sentralitas ASEAN dalam Laut China Selatan. Sikap asertif yang perlu ditingkatkan oleh ASEAN agar Republik Rakyat China mampu mengurangi manuver-menuver yang mampu memicu ketegangan di kawasan akibat klaim yang telah dilakukannya sepihak. Karena itu lah Indonesia melakukan langkah Bidak Kuda Diplomasi Megafon yang dilakukan oleh Presiden Jokowi yang menjadikan langkah pembuka yang bagus, tetapi langkah tersebut akan lebih baik jika diikuti oleh penjagaan teritorial yang terbilang aman.

Dengan langkah Bidak Kuda yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi menunjukkan sikap Republik Indonesia untuk mempertahankan Natuna dari Klaim Republik Rakyat China. Republik Indonesia seakan memberi petanda atau signal bagi China untuk tidak bermain-main lagi dengan permasalahan klaim di Laut China Selatan khususnya Kepulauan Natuna milik Republik Indonesia.

Indonesia memberi tanda berupa pembangunan pangkalan militer di Kepulauan Natuna karena sangat penting dalam menjaga sumber daya alam di kawasan tersebut dan serta pembangunan pangkalan militer juga akan dibangun di perbatasan-perbatasan terluar Republik Indonesia. Bahkan melalui Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yaitu Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa penargetan pangkalan militer di Kepulauan Natuna akan selesai pada tahun 2017. Dengan pembangunan

pangkalan militer yang dilakukan di Kepulauan Natuna membuat Republik Indonesia seakan berubah sikap dalam mempertahankan Natuna terhadap Indonesia dengan Republik Rakyat China pernah terlibat beberapa kali insiden di perairannya.

Pada tahun 2016 lalu Republik Indonesia sudah mulai melakukan pembangunan pangkalan Militer di Natuna dan pembangunan militer daerah barat daya Kalimantan tersebut seolah menampakkan ketegasan Republik Indonesia dalam pertahanan di tepi wilayah sengketa Laut China Selatan dan Indonesia juga akan mengembangkan *Radar Monitoring* di Natuna mengingat Natuna berbatasan dengan beberapa negara. Setelah pengembangan persoalan *Radar Monitoring* di Natuna, Indonesia juga akan melakukan perbaikan landasan pacu di Natuna hingga mampu mendarati pesawat berbadan besar. Sembari mengingat pembangunan pangkalan Militer Republik Indonesia di sana, TNI angkatan laut dan Bakamla (Badan Keamanan Laut) akan selalu meningkatkan patroli di perairan Natuna guna penjagaan kawasan di sana (Andinni & Stefanie, 2016).

Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akan melakukan penginstruksian untuk pengembangan di bidang perikanan di Natuna, dikarenakan menurut laporan bahwa hasil laut di Natuna baru mencapai 8,9% dari potensi yang dimiliki oleh Natuna dan dengan hal tersebut Pemerintah Indonesia akan membangun gudang penyimpanan ikan pada bulan Agustus tahun 2016 di Natuna. Serta yang menjadi perhatian dari pemerintah Indonesia adalah potensi minyak-gas yang ada di Natuna, karena dari 16 blok migas yang ada di Natuna hanya 5 yang mampu berproduksi, sedangkan 7 blok masih dalam tahapan eksplorasi dan 4 blok masih dalam proses terminasi serta pembangunan dan perbaikan infrastruktur di Natuna untuk mempercepat akses masyarakat dan meningkatkan konektivitas di Natuna (Andinni & Stefanie, 2016).

Maka dari itu proyek pembangunan pangkalan militer di Natuna Kepulauan Riau diyakini akan mengagumkan karena berdasarkan perencanaan-perencanaan yang telah dipersiapkan, pangkalan pertahanan tersebut akan dilengkapi dengan berbagai macam bentuk peralatan tempur hebat. Seperti yang telah ditekankan oleh Panglima besar TNI Jend. Gatot Nurmantyo bahwa pada beberapa desa seperti desa Sepempang di Natuna bakal akan dijadikan Mako Batalyon Komposit, 1 Kompi ex Kompi C 138/TS serta di landasan udara Ranai akan ditempatkan Sisdalops TNI Terpadu, Mess prajurit Integratif, di bangun hanggar pesawat dan heli integratif (JPNN, 2016).

Setelah perintah dari Bapak Presiden Republik Indonesia Jokowi kepada Panglima tinggi TNI Jendral Gatot Nurmantyo, Presiden Jokowi menyatakan mempertegas bahwa pemerintah Republik Indonesia akan memprioritaskan pembangunan kawasan di perbatasan-perbatasan terluar Indonesia termasuk Natuna.

Pembangunan pangkalan militer di Natuna khususnya pada Runway Landasan Udara Ranai perlu ada perpanjangan lagi, dikarenakan kebutuhan untuk pesawat tempur di sana yaitu *Ground Support Equipment*. Pembangunan akan di lakukan pada akhir 2016 dan pada tahun 2017 akan ada perkembangan pembangunan di sejumlah kawasan tersebut. selain itu, Pemerintah Republik Indonesia juga perlu melakukan pembangunan pada dermaga yang dapat disinggahi oleh sejumlah kapal-kapal Republik Indonesia untuk menjaga keamanan perairan di Natuna (KOMPAS, 2016).

Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Perthanan Ryamizard Ryacudu menegaskan bahwasannya anggaran pertahanan yang akan diterima oleh Kementerian dan TNI akan diprioritaskan untuk penguatan pangkalan militer di Natuna dan untuk disiapkan Tiga kapal TNI AL, satu pesawat tempur, radar dan

Drone guna sebagai penangkis serangan melalui udara karena persoalan konflik di Kepulauan Natuna sudah semakin tinggi akibat klaim yang telah dilakukan oleh Republik Rakyat China (Erdianto, 2016).

Perbaikan yang dilakukan dari bidang infrastruktur akan dilakukan pada pelabuhan dan pelebaran landasan pesawat tempur serta penambahan personel tentara dari marinir TNI AL (Angkatan Laut) dan pasukan Khas TNI AU (Paskhas). Namun dari sisa anggaran pertahanan lainnya akan digunakan dalam memperbaiki Alat Utama Sistem Pertahanan (ALUTSISTA) yang masa pemakaiannya belum terlalu lama seperti dalam penggantian suku cadang dan mesin kendaraan perang (Erdianto, 2016).

Dari anggaran tersebut juga akan digunakan untuk membeli alat kelengkapan tempur Indonesia karena banyak pesawat tempur yang dimiliki oleh Republik Indonesia yang tidak memiliki rudal tempur dan pembelian tank dan alat komunikasi juga menjadi prioritas dalam pertahanan di kawasan Natuna. Anggaran yang diperoleh oleh Kementerian Pertahanan dan TNI adalah untuk tahun anggaran di 2017 karena pemerintah Indonesia memang memiliki anggaran yang terbatas dan Kementerian Pertahanan dan TNI telah mengajukan dana anggaran tahun 2017 sebanyak Rp.104 Triliun sampai Rp. 107 Triliun ke DPR (Erdianto, 2016).

Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa akan menjadikan Kepulauan Natuna sebagai salah satu area yang harus diprioritaskan untuk dibangun pada saat ini. Pemerintahan Republik Indonesia melakukan pembangunan di bidang ekonomi dan juga Presiden Jokowi juga ingin menjadikan Natuna sebagai pengkalan militer Republik Indonesia. Perencanaan yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi beserta para petinggi TNI akan membangun benteng pertahanan terpadu tiga matra yaitu darat, laut dan udara. Pembangunan yang telah dilakukan di Kepulauan Natuna baru

berlangsung 10% dan sisanya akan selesai setelah anggaran yang telah di ajukan oleh Kementerian Pertahanan dan TNI turun dari DPR (Rappler.com, 2016).

Adapun sekitar 6 daerah di Kepulauan Natuna yang akan di bangun pertahanan Integrasi yaitu di Ranai, Sepempang, Desa Sungai Ulu, Selat Lampa, Desa Tanjung Payung dan Desa Tanjung Datuk. Pada Desa Sungai Ulu, Pemerintah Republik Indonesia dan TNI akan membangun Baterai Arhanud Rudal, pembangunan di Tanjung Sekal yaitu membangun dermaga Bunker kapal selam, dan anggaran untuk pembangunan tersebut juga telah dimasukkan ke dalam APBN tahun 2016 (Rappler.com, 2016).

Pembangunan yang dilakukan pada selat Lampa yaitu membangun dermaga kapal atas air, dermaga beaching serta fasilitas pangkalan dengan luar dermaga mencapai 7,4 hektar. Pada Desa Setengar akan dilakukan pembangunan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan TNI yaitu kompleks Maharlan, gudang amunisi terpadu serta markas Kizipur dan pembangunan tersebut baru berjalan 8% pada pondasi dan bangunannya. Pada desa Tanjung payung dibangun fasilitas radar permukaan dan long range camera dan desa Tanjung datuk akan dibuat radar permukaan, radar weibel, long range camera dan satu kompleks baterai armed mlrs (Rappler.com, 2016).

Gambar 4.1 Daftar Wilayah di Kepulauan Natuna sebagai tempat Pembangunan Pangkalan Militer (Rappler.com, 2016).

<p>1. DESA TANJUNG DATUK (LUAS +/- 12 HA)</p> <p>Mabes TNI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - radar weibel (TA. 2016) - radar permukiman (TA. 2017) - long range camera (TA. 2017) <hr/> <p>TNI AD:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 kompi/baterai armed MLRS (TA. 2016-2017) 	<p>5. TANJUNG SEKAL (LUAS +/- HA)</p> <p>TNI AL</p> <ul style="list-style-type: none"> - dermaga bunker kapal selam (TA. 2016)
<p>2. DESA TANJUNG PAYUNG (LUAS +/- 3 HA)</p> <p>Mabes TNI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - radar permukiman (TA. 2017) - long range camera (TA. 2017) 	<p>6. DESA SEPEMPANG (LUAS +/- 19 HA)</p> <p>TNI AD:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mako yon komposit (TA 2016-2017) - 1 KJ INF Ex Kompi C136/TS (TA. 2016)
<p>3. SELAT LAMPA (LUAS +/- 7,4 HA)</p> <p>TNI AL:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dermaga kapal atas air (TA. 2016-2017) - dermaga beaching (TA 2016-2017) - fasilitas pangkalan (TA 2016-2017) 	<p>7. LANUD RANAI (LUAS +/- 405 HA)</p> <p>Mabes TNI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sisdalops TNI terpadu (TA. 2017) - mess prajurit integratif (TA 2016) - hanggar pesawat/heli integratif (TA. 2017) - rumah sakit integratif (TA. 2016) <hr/> <p>TNI AU:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hanggar skadron UAV (TA. 2018) - SAT rudal jarak sedang (TA. 2019) - perpanjangan runway (TA. 2017) - pembangunan tax way (TA. 2016) - bunker 5 pesawat tempur (TA. 2019) - satbak hanud titik (TA. 2019) - Den Hanud 475 paskhas (TA. 2019)
<p>4. DESA SETENGAR (LUAS +/- 40 HA)</p> <p>Mabes TNI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gudbek & gud munisi integratif (TA. 2016) 	<p>8. DESA SUNGAI ULU (LUAS +/- 20 HA)</p> <p>TNI AD</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 KJ INF Ex kompi D136/TS (TA. 2016) - kompi/baterai arhanud rudal (TA. 2016)

Setelah melakukan pembangunan keamanan negara berupa pangkalan militer di Kepulauan Natuna, pangkalan militer dari mulai darat hingga diperairan Kepulauan Natuna berupa pembangunan dermaga serta tempat-tempat pangkalan militer yang di miliki oleh Republik Indonesia. Dengan sehubungan Hipotesa yang telah di tulis oleh penulis pada Bab I, Indonesia bukan hanya membangun pangkalan Militer yang ada di Natuna. Tetapi Indonesia juga mengerahkan latihan Militer di Kepulauan Natuna, latihan tersebut juga di atas darat, Udara serta di Laut perairan Kepulauan Natuna.

Latihan yang telah dilakukan oleh Tentara Nasional Republik Indonesia di lakukan di Kepulauan Natuna pada tanggal 6 Oktober 2016 lalu. Latihan Militer di Kepulauan Natuna di beri nama Latihan Puncak Angkasa Yudha 2016 adalah akumulasi dari latihan tingkat personel, satuan dan antarsatuan, guna menguji

kesiapsiagaan satuan sekaligus menguji doktrin operasi udara yang bertujuan memelihara dan meningkatkan kemampuan tempur. Latihan militer di Natuna dilaksanakan latihan militer secara besar-besaran dikarenakan isu konflik yang ada di Kepulauan Natuna yang melibatkan Republik Indonesia dengan Republik Rakyat China di Laut China Selatan. Latihan yang dilakukan oleh pasukan militer Indonesia tersebut digadang-gadangkan menjadi latihan terbesar yang pernah dilakukan oleh Republik Indonesia di kawasan yang sensitif tersebut dan latihan militer terbesar tersebut TNI juga mencoba rudal-rudal buatan China (DW.com, 2016).

Dalam latihan yang telah digelar di Kepulauan Natuna serta perairan Natuna yang menandakan bahwa sikap Indonesia di wilayah di sekitar Kepulauan Natuna. Latihan puncak Angkasa Yudha 2016 di Natuna tersebut akan dilakukannya simulasi apabila terjadinya serangan melalui udara dan perebutan landasan pacu yang dikuasai musuh.

Pada latihan tersebut peralatan-peralatan tempur Republik Indonesia di uji coba seperti belasan Jet tempur Tipe F-16 dan Sukhoi yang akan dilibatkan dalam manuver besar-besaran tersebut dan seluruhnya ada sekitar 13 unit Jet Tempur F-16 yang akan dikerahkan pada wilayah yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan. Kemudian adapun Empat pesawat tempur Sukhoi SU-30MKI Flankers dari Skadron 11 TNI AU di siagakan di Hang Nadim, Batam. Pesawat-pesawat tempur tersebut dilengkapi 18 bom aktif per satu pesawat, jadi empat pesawat tempur akan ada 72 bom aktif yang akan di gunakan pada Latihan Puncak Angkasa Yudha (DW.com, 2016).

Pada latihan yang digelar di Kepulauan Natuna dan perairan Natuna tersebut akan ditembakkan bom-bom pada target laut di sekitaran perairan Ranai dengan rentang lebar sasaran sekitar 2,2 Kilometer dan panjang sekitar 3 kilometer. Latihan

militer tersebut juga akan dilakukan peluncuran rudal anti-kapal C-705 dan C-705 yang sebelumnya pernah gagal dalam latihan militer (DW.com, 2016).

TNI Angkatan Darat juga membawa sejumlah alat perang utama sistem pertahanan dan pasukan di Natuna. Latihan militer TNI Angkatan Darat tidak bersamaan pada latihan TNI AU dan TNI AL, latihan yang dilakukan oleh TNI AD yaitu dilaksanakan pada 10-17 november 2016 lalu. Pada latihan militer di Natuna, TNI AD telah membawa 19 Unit Tank Leopard dan untuk di latihan Natuna satuan ini menggunakan Lima kapal ADRI yang memiliki bobot seberat 62,5 ton serta TNI AD membawa perelatan tempur lainnya seperti peluncur roket Astros, Meriam 155 milimeter Caesar tipe truk, dan tank Marder (Tempo.co, 2016).

Latihan Militer yang dilakukan oleh Republik Indonesia di Kepulauan Natuna di hadiri oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo serta Menteri Pertahanan Ramizard Ryacudu dan Panglima Tinggi TNI Jendral Gatot Nurmantyo. Pada latihan militer tahun 2016 berlangsung di tengah ketegangan konflik sengketa antara Republik Indonesia dan Negara Anggota ASEAN yang terlibat dengan Republik Rakyat China di Laut China Selatan. Pada latihan militer yang dilakukan oleh Indonesia dikatakan tidak provokasi dikarenakan menurut Kadispem TNI AU Marsma TNI Jemi Trisonjaya bahwa tidak ada Indonesia mengarah untuk memprovokasikan karena Natuna adalah murni milik Indonesia sehingga latihan Puncak TNI AU dilaksanakan dimana saja termasuk Natuna selagi masih di dalam wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia. Latihan puncak TNI AU di Pulau Natuna digelar hampir bersamaan dengan latihan gabungan antara militer Filipina dan Amerika Serikat, serta latihan terpisah tahunan yang dikenal dengan Bersama Lima yang melibatkan Australia, Malaysia, Singapura, Selandia Baru dan Inggris di Laut Cina Selatan (BCCIndonesia, 2016).

Sembari pelatihan militer yang dilakukan oleh TNI AU Indonesia pada bulan Juni 2016 lalu seakan seperti memberi tanda ataupun signal bagi Republik Rakyat China atas sikap Indonesia dalam menghadapi sengketa di Natuna, Presiden Republik Indonesia Jokowi menggelar rapat terbatas di KRI Imam Bonjol-383 dan kapal tempat diadakannya rapat tersebut adalah kapal yang melakukan penembakan ke kapal nelayan China karena telah melakukan Illegal Fishing di perairan Natuna, wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (BCCIndonesia, 2016).